

Korupsi Sektor Pendidikan

Almas Sjafrina

Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW

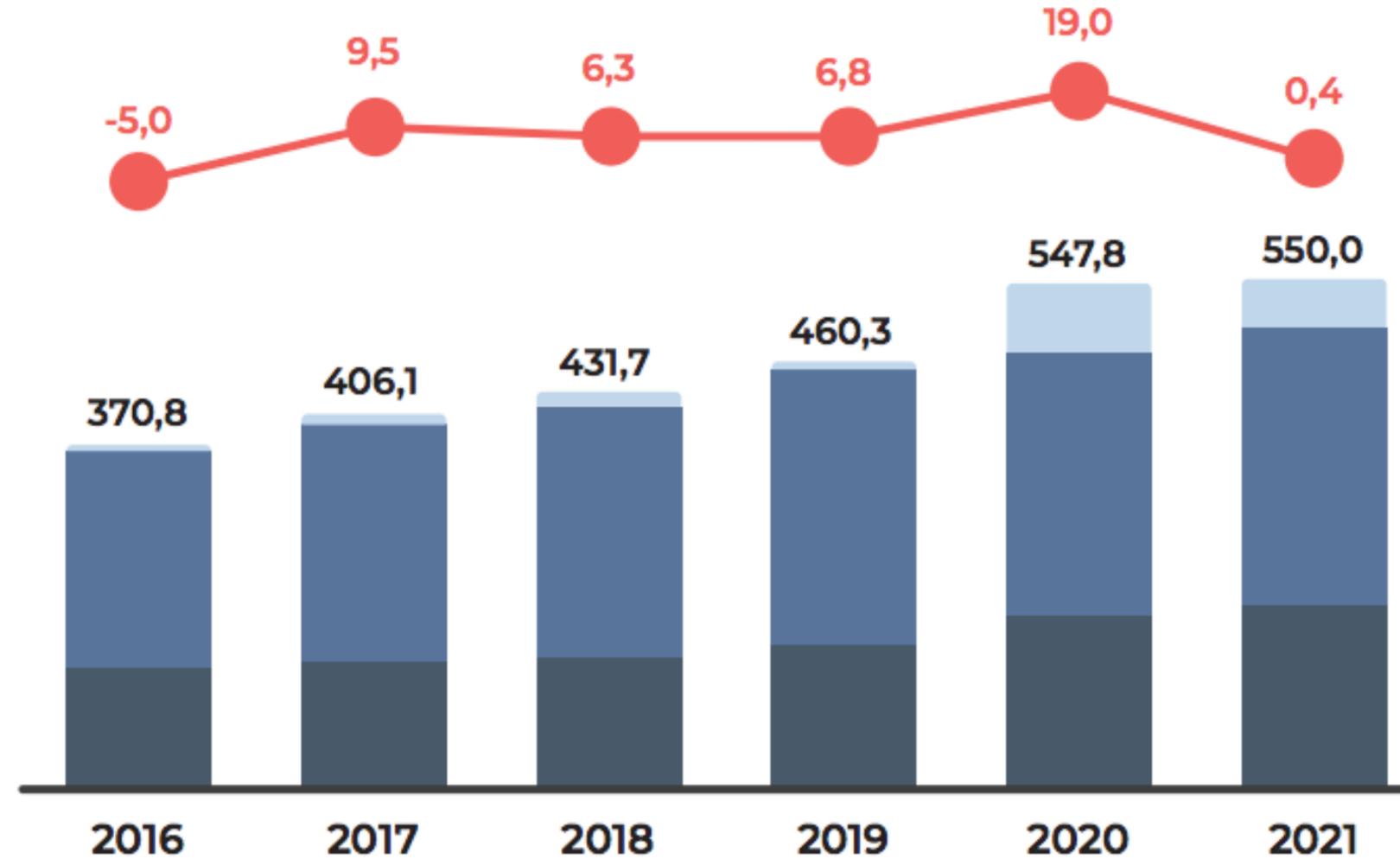
Disampaikan dalam Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Publik yang diselenggarakan TII, 10 Agustus 2021



Anggaran Pendidikan 2016-2021

(triliun rupiah)

- BPP
- TKDD
- Pembiayaan Anggaran
- Pertumbuhan (persen)



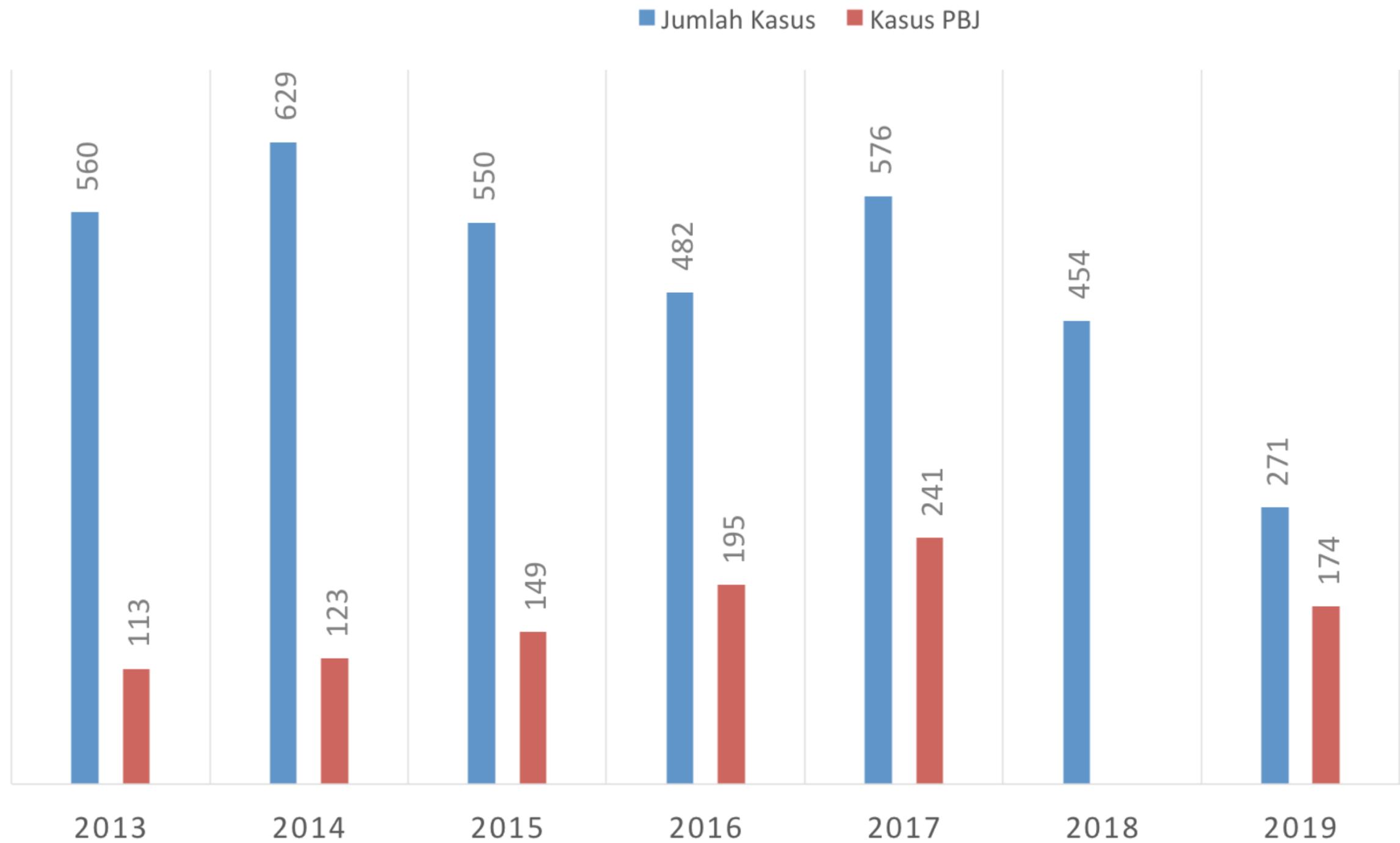
APBN untuk sektor pendidikan: sedikitnya 20% dari belanja negara

Bagaimana Kualitas Pendidikan di Indonesia?

- **Survei Program for International Student Assessment (PISA):** performa pendidikan Indonesia (membaca, matematika, kinerja sains) turun dari tahun 2013 ke 2018 (OECD, 2019)
 - **Peringkat 72 dari 77 negara**
- **Daya saing SDM Indonesia masih tertinggal, berada di urutan ke-50 dari 141 negara (World Economic Forum, 2018)**



PENINDAKAN KORUPSI PBJ 2013-2019



Sumber: ICW, 2021

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1	Transportasi	46 kasus	Rp 912 miliar
2	Anggaran Desa	27 kasus	Rp 20 miliar
3	Pendidikan	25 kasus	Rp 61,1 miliar
4	Pemerintahan	20 kasus	Rp 89,4 miliar
5	Kesehatan	18 kasus	Rp 51 miliar

Pelayanan publik menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi. Pengadaan barang yang secara periodik dianggarkan oleh pemerintah menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Selain itu seringkali pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mengakibatkan barang tidak digunakan.

Sektor Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

TAHUN PENINDAKAN: 2016-2017

Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

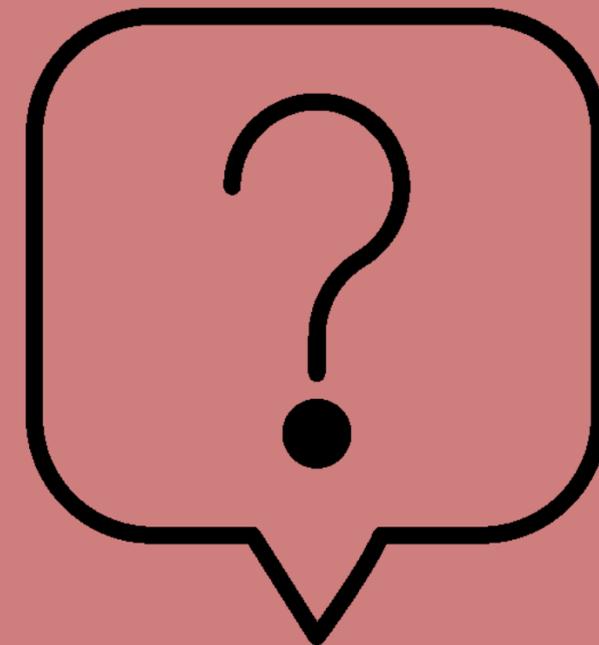
No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara /suap
1	Penyalahgunaan anggaran	67 kasus	Rp 266 miliar
2	Mark up	60 kasus	Rp 496 miliar
3	Kegiatan/proyek fiktif	33 kasus	Rp 182 miliar
4	Penyalahgunaan wewenang	26 kasus	Rp 440 miliar
5	Laporan fiktif	21 kasus	Rp 140 miliar
6	Penggelapan	16 kasus	Rp Rp 34,2 miliar
7	Suap	13 kasus	Rp 33,7 miliar
9	Penyunatan/ Pemotongan	2 kasus	Rp 132 juta
10	Pemerasan	1 kasus	-
11	Pungutan liar	1 kasus	-
	TOTAL	241 kasus	Rp 1,5 triliun

TAHUN PENINDAKAN: 2016-2017

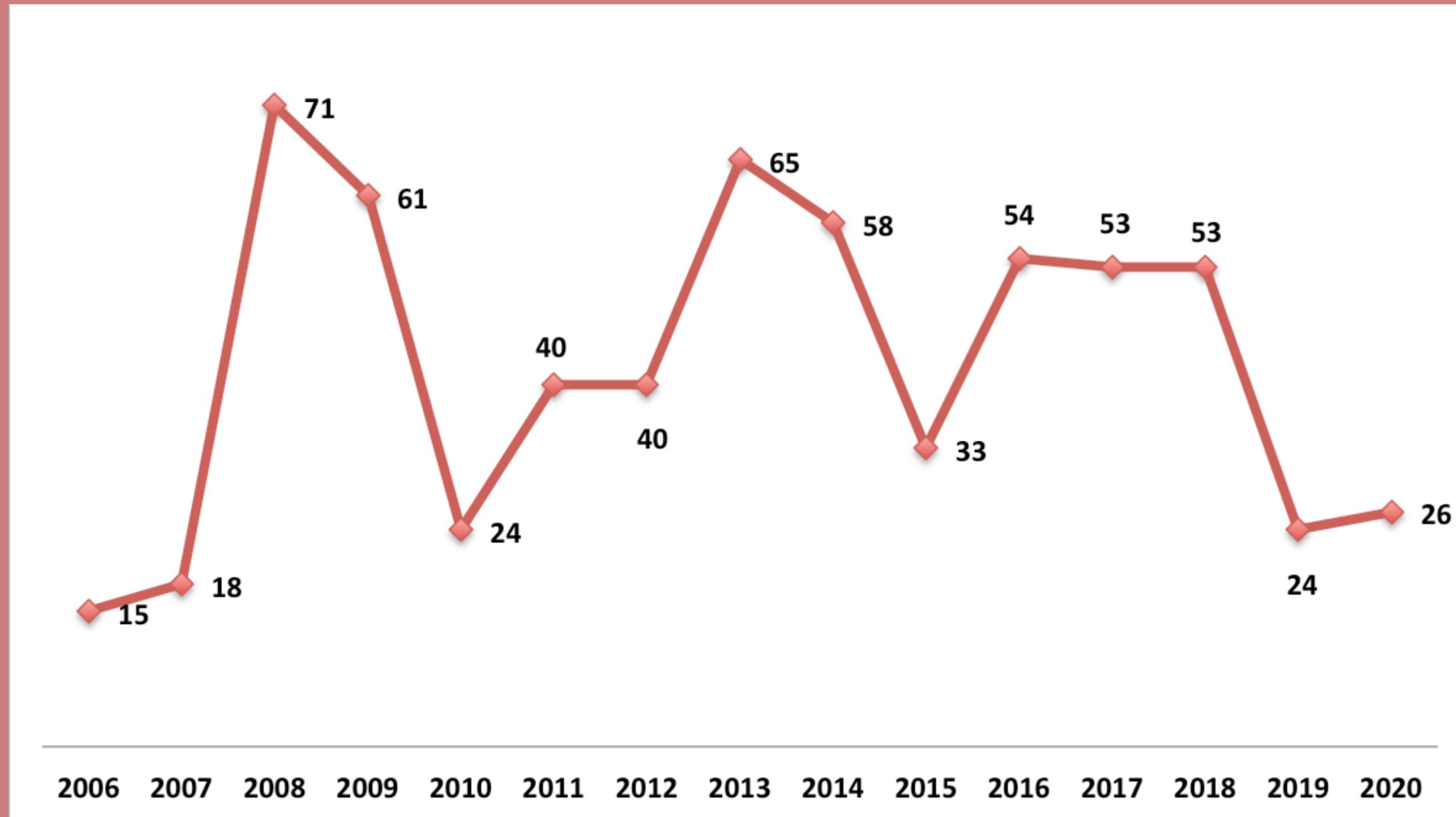
MODUS KORUPSI PBJ

Perencanaan	Pemilihan	Kontrak	Pelaksanaan	Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suap legislatif / PA ▪ Pengaturan proyek / ijon ▪ Pengaturan spek ▪ Duplikasi proyek ▪ Penyelewengan / penggelapan anggaran ▪ Memecah paket 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen admin dan syarat palsu ▪ Jual-beli / sewa dokumen admin dan syarat kualifikasi ▪ Persekongkolan horisontal / arisan / pengaturan harga ▪ Persekongkolan vertikal dan suap ▪ Post-bidding / pengubahan spek setelah kompetisi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mark-up / jual ulang ▪ Mark-down + tukar aset/layanan negara ▪ Proxy / jual bendera ▪ Harga timpang / Kontrak > HPS ▪ Kickback dan komisi ▪ Pengubahan kontrak tanpa addendum ▪ Post-award / pengubahan spek setelah pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyek fiktif ▪ Proyek terbengkalai / gagal / tidak sesuai spesifikasi ▪ Wanprestasi: kontrak / pekerjaan / pemeliharaan tidak berjalan / selesai ▪ Sub-kontrak ilegal ▪ Pemerasan / pungli 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suap auditor dan pengaturan audit ▪ Menghilangkan temuan / bukti ▪ Meringankan hukuman ▪ Serah terima sebelum selesai ▪ Berita acara / laporan fiktif

**BAGAIMANA
PERKEMBANGAN
PENINDAKAN KORUPSI
PENDIDIKAN**



Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan Tahun 2006-2020: 635 Kasus



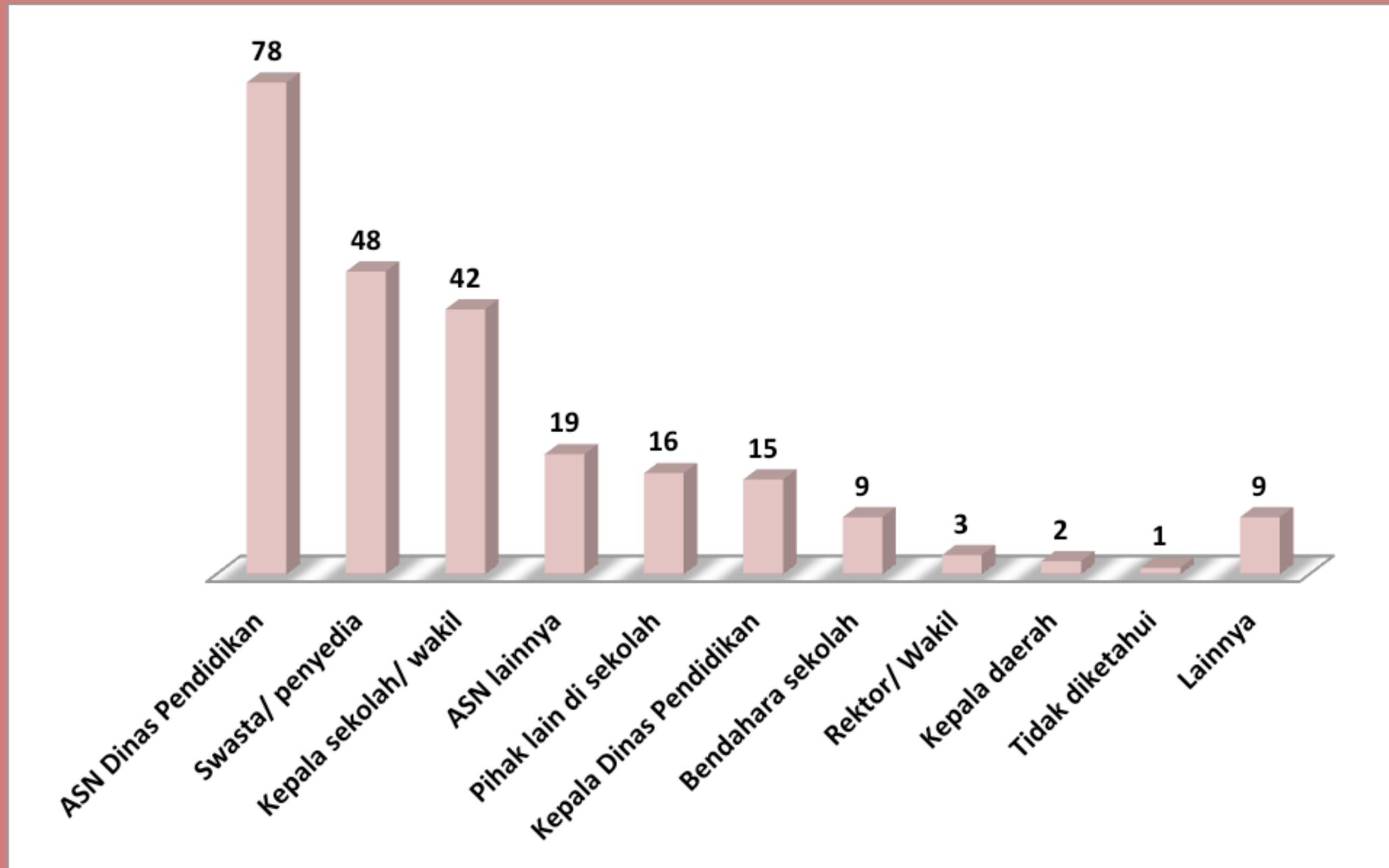
Sumber: ICW, 2021



**DIDUGA
MERUGIKAN
NEGARA SEKITAR
RP 1,704 TRILIUN**

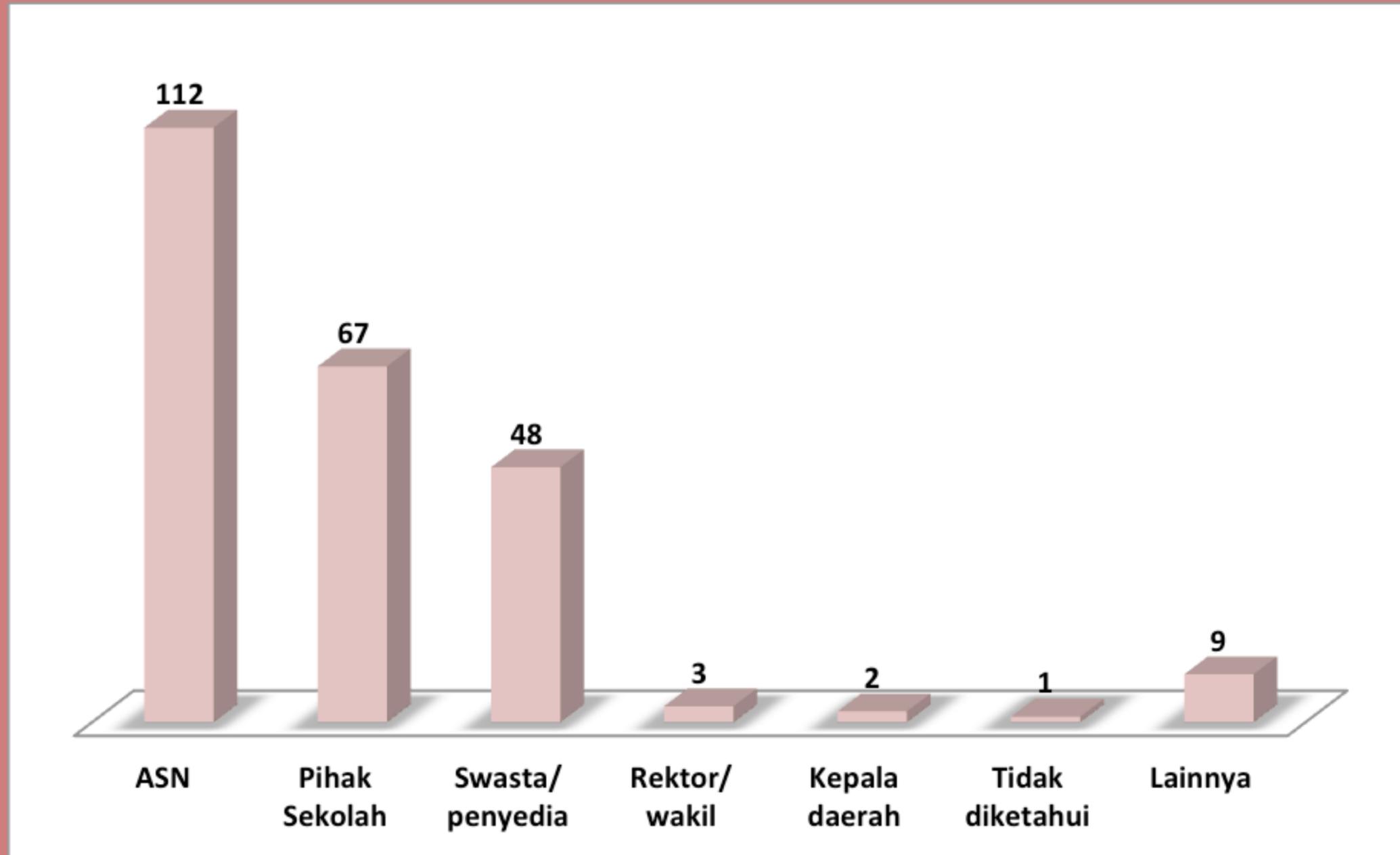
- Terdapat sejumlah kasus yang tidak diketahui kerugiannya.
- Penanganan perkara masih berlangsung saat kasus ini diinventarisir, sehingga terdapat kasus yang kerugiannya masih dalam tahap penghitungan dan belum inkraht

Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Tahun 2018-2020 (242 Tersangka dalam 3 Tahun Terakhir)



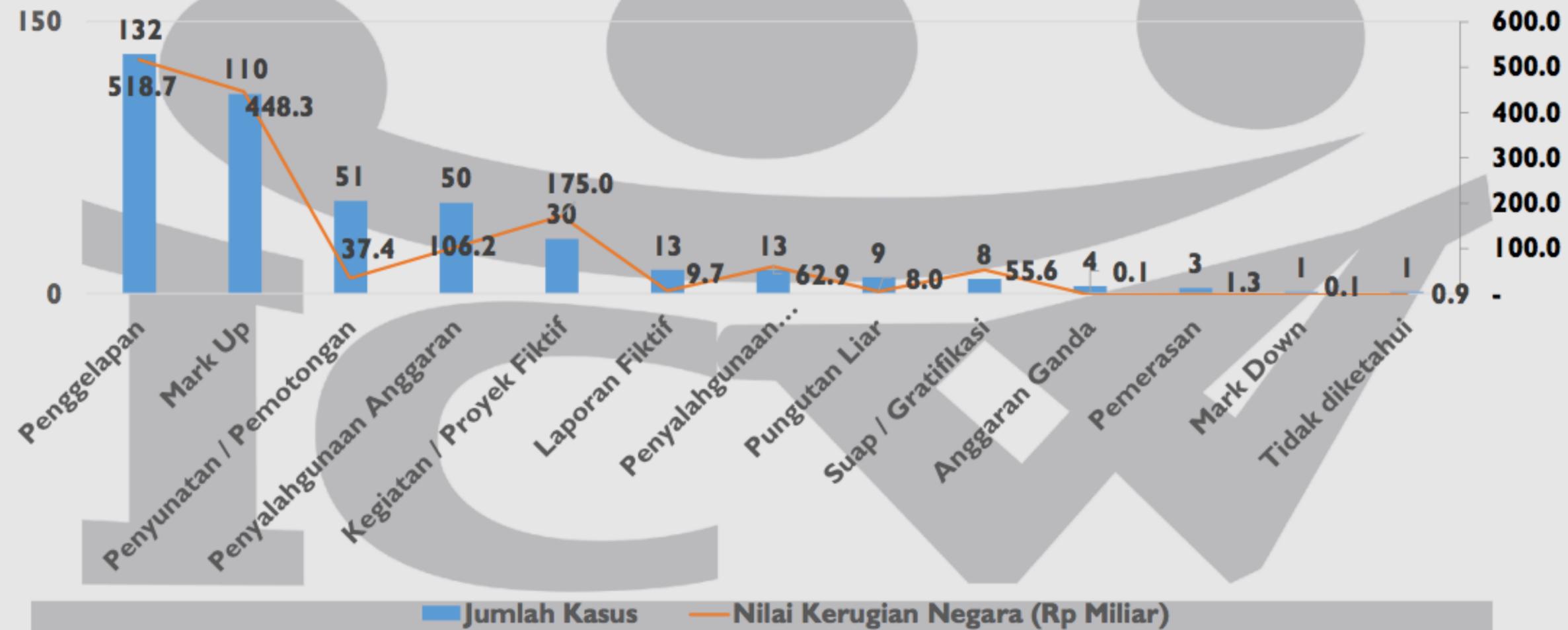
**SEKOLAH DAN DINAS
PENDIDIKAN: LAHAN
SUBUR KORUPSI
PENDIDIKAN**

Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Tahun 2018-2020



Sumber: ICW, 2021

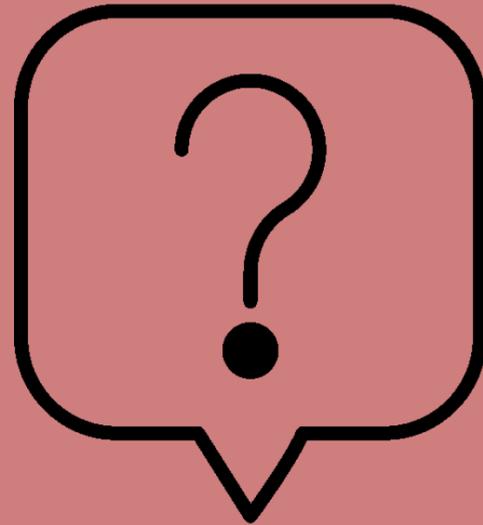
KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN MODUS



Tahun Penindakan: 2006-2015

Sumber: ICW, 2016

MENGAPA SEKTOR PENDIDIKAN RENTAN DIKORUPSI



- **Kerentanan sistem**
- **Anggaran yang besar, transparansi yang minim, dan pengawasan yang tidak berjalan efektif**
- **Dampak sistemiknya korupsi politik dan birokrasi**

- **PBJ masih menjadi lahan elit politik-bisnis daerah berburu rente**
 - **Persoalan patronase politik-bisnis, berakar dalam karut marut persoalan politik**
 - **Tidak hilang dengan inovasi PBJ**
- **Adanya pungutan liar berjenjang di tiap tikungan:**
 - **Dari guru, kepala sekolah, atau sekolah kepada siswa/ calon siswa untuk kompensasi PPDB dan keperluan sekolah.**
 - **Dari pengawas pembinaan, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan kepada guru untuk lancar sertifikasi dan pengangkatan jabatan.**
 - **Dari oknum pemerintah daerah kepada sekolah dengan ancaman, mulai dari mutasi atau jabatan hingga menghambat proses pencairan dana BOS (sebelum dana BOS ditransfer langsung dari kas negara ke rekening sekolah).**
 - **Dari kepala daerah kepada pejabat dinas dengan timbal balik pengangkatan/ promosi jabatan.**
- **Perencanaan dan penggunaan dana BOS tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, tidak transparan, dan tidak akuntabel.**

Korupsi Pendidikan Tak Kenal Pandemi Covid-19: Dana BOS dan BOP Dibawah Ancaman Korupsi